

BAB I

PENDAHULUAN

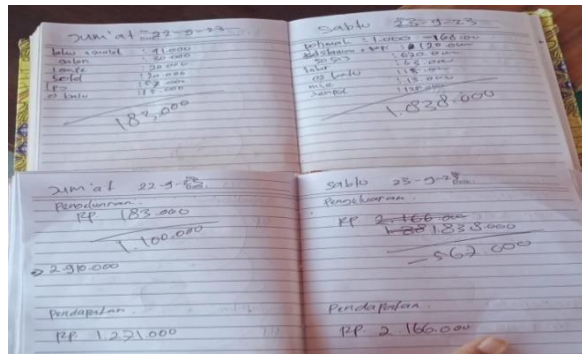
1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima secara bertahap. Dana desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi melainkan juga dana desa difokuskan kepada infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa bidang harus dilakukan desa dalam memprogramkan dana desa tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengalokasikan produk unggulan yang ada di wilayah desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa (Desa, 2013), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka geliat dan aktivitas BUMDes di Indonesia terus meningkat secara signifikan.

Pendirian BUMdes sebagaimana disebut dalam Permendesa PD TT No. 5 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagai pengelola BUMDes yang memiliki tanggung jawab mengembangkan atau mengelola potensi yang ada di desa tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang telah dijalankan, termasuk

laporan biaya pengeluaran dan laporan biaya pemasukan BUMdes. UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMdes yang dibuat dalam system akuntansi yang sederhana. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang telah dijalankan di desa tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Pada tahun 2023 jumlah Bumdes di Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 55.731 BUMDes meliputi 50.487 BUM Desa 5.244 BUM Desa Bersama (Kemendesa, 2023). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur jumlah BUMDes (Pemrov) sekitar 6.980 BUMDes. Jumlah BUMDes di Kabupaten Sampang berjumlah 180 BUMDes termasuk BUMDes yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan data (Kemendesa, 2023).

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara bersama Bapak Ripin selaku Ketua BUMDes Wisata Padi-Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik dan Bapak Syarif selaku Pendamping BUMDes Gubuk Apung Desa Astapah Kecamatan Omben, ditemukan adanya fenomena atau masalah yang peneliti temui pada kedua BUMDes tersebut yaitu, terdapat adanya masalah tentang pengelolaan transparansi anggaran yang dimana transparansi tersebut belum dilakukan oleh pengurus BUMDes Gubuk Apung Desa Astapah Kecamatan Omben dan Wisata Padi-Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik kepada masyarakat setempat. Laporan yang ditunjukkan oleh Ketua BUMDes Wisata Padi-Padi dan BUMDes Gubuk Apung kepada peneliti hanya sebatas coretan biasa diatas kertas yang menuliskan pendapatan keuntungan serta pengeluaran yang dikeluarkan perhari.



Gambar 1.1 Observasi Peneliti pada Objek Penelitian

Laporan keuangan tersebut belum sesuai menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 11 TAHUN 2021 Pasal 48 ayat 2 yang berbunyi “memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2(dua) tahun berturut-turut“, sehingga Laporan Keuangan tersebut hanya berjalan 1 tahun. Keterbukaan anggaran yang peneliti temukan di lapangan yaitu tidak adanya transparansi dari ketua BUMDes Gubuk Apung Desa Astapah dan BUMDes Wisata Padi-Padi Desa Taman. Anggaran pendapatan maupun Belanja Desa (APBDES) tidak adanya keterbukaan pada anggaran pengelolaan keuangan BUMDes. Anggaran awal yang didapatkan oleh BUMDes Wisata Padi-Padi kurang lebih sebesar 550 juta pengakuan dari Bapak Syarief selaku ketua BUMDes Wisata Padi-Padi, Sedangkan anggaran Gubuk Apung kurang lebih sebesar 300 juta berbanding jauh dengan anggaran yang didapatkan BUMDes Wisata Padi-Padi.

Oleh karena itu, Akuntabilitas dan Transparansi sangat diperlukan dan ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga mencapai tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) tersebut. BUMdes juga membutuhkan pertanggungjawaban keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara transparan mengenai posisi keuangan yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Standar akuntansi pemerintah dengan menyajikan catatan atas laporan keuangan. Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat agar dapat menjangkau berbagai sektor keuangan. Dengan meningkatkan pendapatan BUMdes maka laporan pertanggungjawaban keuangan harus dibuat transparan kepada pemerintah desa.

Konsep Akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan atau program harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun kepada instansi yang telah memberi kewenangan terhadap program yang telah dijalankan tersebut. Akuntabilitas menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mementingkan kepentingan masyarakat tersebut (Aprillianto et al., 2022). Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawabkan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akuransi akuntabilitas terhadap organisasi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban tersebut diperlukan juga transparansi dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan.

Kasus temuan seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rambu Ana & Ga, 2021). Laporan Keuangan yang dibuat BUMdes Ina Huk masih kurang

dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku. Laporan keuangan untuk tahun yang berjalan saat ini belum dibuat pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk hanya menampilkan beberapa indikator atau komponen saja. Sehingga dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum akurat. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk belum bisa dibandingkan dengan instansi lainnya sehingga belum sesuai dengan standar laporan keuangan. Pihak BUMDes belum mempublikasikan ke media massa karena keterbatasan fasilitas yang mereka miliki.

Penelitian (Mahmudah, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungon Legowo Bungah Gresik, bahwa laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan pemasukan dan pengeluaran sederhana yang belum dikonsolidasikan, sehingga pihak yang bertanggung jawab pada BUMDes belum bisa memperoleh laporan keuangan secara utuh. Penyusunan laporan laba rugi konsolidasi berasal dari masing-masing kegiatan dan hasilnya cukup memuaskan dengan diperolehnya laba bersih yang cukup signifikan. Untuk penyusunan neraca data yang dibutuhkan masih kurang karena harus melakukan sejumlah penilaian atas aktiva yang telah digunakan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maslikah et al., 2021). Mengatakan bahwa dalam pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes Tamanharjo Bersinar masih dilakukan dengan sederhana. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pada sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang sebagian masih berpendidikan rendah, keterbatasan ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat. Sedangkan dalam pengelolaannya seharusnya sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan, yaitu harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian (Asmawati & Basuki, 2019). Mengatakan bahwa perbedaan antara ketentuan regulasi tentang pengelolaan dana desa dengan praktik yang terjadi di Desa Dore. Regulasi seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri 113/2014 sebenarnya mengatur bahwa setiap transaksi keuangan desa harus dicatat melalui rekening kas desa, dilengkapi bukti pengeluaran yang sah, dan dilaporkan tepat waktu. Namun, dalam kenyataannya aparat Desa Dore tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Penerimaan dan pengeluaran tidak dicatat sesuai prosedur, banyak transaksi tidak disertai kuitansi resmi, dan laporan pertanggungjawaban sering terlambat. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang jelas antara aturan dan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMdes hanya menguak masalah di lapangan serta menjabarkan masalah yang ada serta penelitian terdahulu tidak mengatasi masalah dalam Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Tranparansi yang ditemukan. Maka dari itu pemerintah desa digugat untuk bertugas lebih tranparansi dan akuntabel. Jika potensi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam setiap pengelolaannya termasuk pelaporan keuangannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian terdahulu dilihat dari penelitian (Maslikah et al., 2021) laporan keuangan pada BUMDes Taman Harjo Bersinar masih dilakukan dengan sederhana dikarenakan keterbatasan pada sumber daya manusia yang masih berpendidikan rendah. Sehingga laporan keuangan tersebut tidak berlandaskan kepada pedoman umum yakni Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP, dan selain itu juga tempat serta waktu penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Tempat penelitian ini merupakan tempat dengan 2 Kecamatan yang berbeda, bisa dikatakan lintas Kecamatan. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan tempat penelitian tersebut merupakan BUMDes baru berjalan dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan telah dilakukan pra survey oleh peneliti di lapangan, jadi semakin besar rasa peneliti ingin meneliti akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada BUMDes tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang ada pada lapangan tanpa menjabarkan masalah yang ada pada penelitian tersebut.

Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian kali ini menggunakan metode studi kasus multiple case study yaitu peneliti ingin mengungkapkan masalah yang ada pada dua tempat penelitian yang peneliti akan teliti untuk membandingkan kasus atau perbedaan kasus pada lokasi yang akan diteliti. Selain itu juga, perbedaan tempat serta waktu penelitian dengan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, selain itu juga, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut yaitu tempat yang strategis dari kedua BUMDes tersebut. BUMDes Wisata Padi-Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik berada pada bagian barat Kabupaten Sampang disamping jalan raya utama yang dilalui oleh pengendara luar kota maupun pengendara warga lokal, untuk BUMDes Gubuk Apung Desa Astapah Kecamatan Omben berada pada bagian timur Kabupaten Sampang perbatasan antara Kota dan Desa yang cukup ramai penduduk. Pengelolaan Laporan Keuangan BUMdes harus secara Transparansi dan Akuntabel dikarenakan hal itu

penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi. Maka dari berbagai permasalahan dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan BUMdes (Studi Kasus Wisata Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik dan Gubuk Apung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)** untuk mewujudkan transparansi dan Akuntabel dalam pelaporan keuangan demi kemajuan ekonomi desa yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan berbagai persoalan dan dinamika penyelenggaraan tata kelola keuangan pada kedua BUMDes yang telah dipaparkan, diperlukan perumusan masalah yang mampu menangkap inti isu yang diteliti secara jelas dan terarah. Rumusan masalah ini penting untuk memberikan batasan analisis sekaligus menegaskan fokus penelitian pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada BUMDes Bintang Karya Kecamatan Omben dan Taman Jaya Kecamatan Jrengik di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan komparasi secara mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan pada BUMDes Wisata Padi Desa Taman Kecamatan Jrengik dan BUMDes Gubuk Apung Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian ini disusun untuk menelaah bagaimana

kedua BUMDes tersebut menerapkan prinsip keterbukaan informasi, baik dalam bentuk penyajian laporan, pemberian akses kepada masyarakat, maupun mekanisme pelaporan kepada pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan utama atas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah sistem pertanggungjawaban keuangan pada kedua BUMDes telah dilaksanakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman regulasi yang berlaku termasuk kewajiban pelaporan kepada pemerintah desa, badan pengawas, serta instansi terkait lainnya. Melalui proses komparasi ini, penelitian ingin mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan pola tata kelola keuangan pada kedua BUMDes, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terlaksananya akuntabilitas dan transparansi tersebut. Secara lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana penerapan prinsip good governance telah dijalankan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Wisata Padi dan BUMDes Gubuk Apung.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi, rekomendasi, dan perbaikan bagi kedua BUMDes agar mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana kualitas pengelolaan keuangan dapat memengaruhi efektivitas program BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan menelusuri proses administrasi, penyusunan laporan, hingga bentuk-bentuk transparansi yang ditunjukkan kepada masyarakat, penelitian ini berupaya memberikan gambaran nyata mengenai kapabilitas kelembagaan kedua BUMDes

dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengembangan kapasitas, pembinaan, dan pengawasan agar praktik tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan dapat diwujudkan secara berkelanjutan di masa mendatang. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola BUMDes yang diteliti, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi BUMDes lain dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam kerangka laporan keuangan sektor publik, penelitian ini menegaskan pentingnya pemenuhan prinsip akuntabilitas publik melalui penyajian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, serta prinsip transparansi yang menuntut keterbukaan data keuangan agar dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana variasi dalam struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan kelengkapan dokumen berpengaruh langsung pada tingkat akuntabilitas serta keterbukaan informasi keuangan BUMDes. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai praktik laporan keuangan pada organisasi ekonomi desa, tetapi juga menghadirkan perspektif baru bagi akademisi dalam menganalisis

efektivitas implementasi standar pelaporan sektor publik pada entitas BUMDes yang masih menghadapi beragam tantangan konseptual maupun operasional.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan manfaat empiris bagi pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat dengan menjadi bahan evaluasi atas penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa BUMDes Taman Jaya menghadapi berbagai masalah mendasar seperti pencatatan manual yang tidak konsisten, tidak adanya format baku, serta minimnya bukti transaksi. Kondisi ini menyulitkan penyusunan laporan keuangan dan proses pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat ketidaksamaan persepsi antara Direktur dan Pengawas mengenai keterbukaan informasi, yang menunjukkan lemahnya koordinasi internal dan ketiadaan SOP pelaporan. Sebaliknya, BUMDes Bintang Karya dinilai lebih transparan melalui musyawarah desa, meskipun masih menghadapi keterbatasan media publikasi dan sarana administrasi sehingga informasi banyak disampaikan secara lisan.

Temuan ini menjadi dasar penting bagi kedua BUMDes untuk memperbaiki sistem administrasi, memperkuat bukti transaksi, membuat format laporan yang baku, serta meningkatkan kapasitas aparatur. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian menggarisbawahi kebutuhan pendampingan, pelatihan, dan penguatan fungsi pengawasan agar tata kelola BUMDes berjalan lebih kredibel dan sesuai regulasi. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga memberikan arah perbaikan yang dapat langsung diterapkan para pemangku kepentingan.

1.4.3 Secara Praktisi

Penelitian ini memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan BUMDes. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang lebih komprehensif dalam memahami kebutuhan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap BUMDes, sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dapat berlangsung secara lebih kredibel, terarah, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Pemerintah desa juga memperoleh gambaran nyata mengenai kelemahan administratif dan teknis yang masih dihadapi BUMDes, sehingga dapat merumuskan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat Desa Taman Kecamatan Jrengik dan Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, penelitian ini memberikan informasi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BUMDes, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pengelola BUMDes menjalankan prinsip keterbukaan, kejujuran, serta pertanggungjawaban publik. Informasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, mendorong partisipasi aktif, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wadah untuk menerapkan pengetahuan akademik yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memperluas wawasan mengenai praktik nyata pengelolaan keuangan desa, khususnya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam konteks BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pengalaman ini

juga memperkaya kemampuan peneliti dalam melakukan analisis data kualitatif, memahami dinamika organisasi desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola BUMDes. Selain itu, bagi penelitian lain di masa mendatang, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan dan bermanfaat untuk memperkuat kajian empiris, menyempurnakan model analisis yang telah ada, serta menjadi acuan bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian serupa mengenai pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pada BUMDes atau lembaga sektor publik lainnya.